



Buletin Parlementaria

Nomor 1176/III/XI/2021 • November 2021



DPR Setujui Andika Perkasa jadi Panglima TNI



4 **Sufmi Dasco:**
Masalah Emisi
Karbon Perlu
Kajian Mendalam



5 **Marak Pinjol Ilegal,**
Rachmat Gobel
Usul Perkuat PNM
dan Koperasi



9 772614 339005



BULETIN



Foto bersama Pimpinan DPR RI usai persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Foto: Oji/nvl

DPR Setujui Andika Perkasa jadi Panglima TNI

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Selaku pimpinan rapat, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta persetujuan seluruh Anggota DPR RI.

“Apakah laporan Komisi I DPR RI tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi dan persetujuan Jenderal Andika sebagai calon panglima TNI dapat disetujui?” tanya Puan dalam Rapat Paripurna yang diikuti jawaban “Setuju” seluruh Anggota DPR RI yang hadir secara fisik maupun virtual di Gedung Nusantara

II, Senayan, Jakarta, Senin (8/11). Hadir mendampingi Puan dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus.

Dalam Rapat Paripurna itu, Jenderal Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan Anggota Dewan. Adapun, persetujuan pada Rapat Paripurna DPR merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang sebelumnya telah dilaksanakan Andika Perkasa bersama Komisi I DPR RI.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid memaparkan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR RI terhadap Andika Perkasa. Meutya melaporkan, Komisi

I DPR telah menggelar verifikasi administrasi pada hari Jumat (5/11).

Setelah administrasi dinyatakan lengkap, Komisi I DPR pun memutuskan menggelar RDPU pada Sabtu (6/11) untuk mendengarkan visi dan misi dari calon Panglima TNI yang dilanjutkan verifikasi faktual ke kediaman Andika Perkasa pada Minggu (7/11).

“Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan seluruh fraksi dan anggota Komisi I DPR RI terhadap calon Panglima TNI. Maka Komisi I DPR RI memutuskan, satu, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI,” ujar Meutya.

Setelah pemaparan laporan yang disampaikan Meutya, Rapat Paripurna DPR RI menyepakati untuk menyetujui laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan *fit and proper test* calon Panglima TNI. Rapat Paripurna DPR RI juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. ■ dt,ann/es

Sufmi Dasco: Masalah Emisi Karbon Perlu Kajian Mendalam

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang menyebut pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi, adalah suatu hal yang baik. Namun, Dasco menegaskan, perlu kajian mendalam mengenai emisi karbon itu.

“Saya rasa yang disampaikan Bu Siti Nurbaya baik, tapi memang kita nanti perlu juga kajian yang mendalam soal masalah emisi karbon,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11).

Hal itu karena, persoalan emisi, menurut Dasco bukan hanya menyangkut persoalan Indonesia saja yang terkena dampaknya. Melainkan, masalah lingkungan ini juga berdampak bagi dunia luar. “Karena ini juga akan menyangkut bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia luar,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Diketahui, dalam pertemuan bersama Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) pada Selasa (2/11), Menteri Siti mengungkapkan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok/mvl

“Menghentikan pembangunan atas nama *zero deforestation* sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk *values and goals establishment*, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi,” jelas Menteri Siti dalam *Facebook*, yang dikutip *Parlementaria*, Jumat (5/11).

Menurut Menteri Siti dalam pernyataannya, memaksa Indonesia untuk *zero deforestation* di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena, menurutnya, setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi UUD NRI 1945 untuk melindungi rakyatnya. ■ rdn/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER
Prima Danuritto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Anief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afrhillah, Geraldji Ople, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL
Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Muhammad Ali, Mulus Karyadi,

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Marak Pinjol Ilegal, Rachmat Gobel Usul Perkuat PNM dan Koperasi

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, dalam menghadapi maraknya keberadaan pinjaman *online* (pinjol) ilegal, negara harus hadir, di antaranya dengan memperkuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan koperasi. Ia menilai pinjol ilegal yang menyusahkan masyarakat kecil saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

“Maraknya pinjol karena rakyat kecil butuh uang cepat, mudah, dan dekat. Jadi negara harus bisa menghadirkan lembaga keuangan yang bisa seperti itu. Bagaimana solusinya? Kita kuatkan PNM dan koperasi,” kata Gobel dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Sabtu (6/11).

Diakui Gobel, saat ini banyak rakyat kecil yang terjerat pinjol ilegal dengan bunga mencekik dan teror, sehingga Polri turun tangan dengan mulai menangkap pengelola pinjol ilegal. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, saat ini terdapat 107 pinjol legal dan 3.365 pinjol ilegal yang sudah ditutup.

Namun, sebagian *server* (peladen) pinjol ilegal ini berada di luar negeri, sehingga bisa dengan mudah muncul kembali dengan nama yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, selain menutup *website* pinjol ilegal, pemerintah juga perlu menindak pengelolanya secara pidana. «Kita apresiasi atas semua langkah yang telah dilakukan OJK, Polri, dan pemerintah atas semua langkah yang

telah dilakukan,” puji Gobel.

Namun, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, selain tindakan represif, juga harus diimbangi dengan tindakan kuratif. “Harus ada solusi untuk menyelesaikan akar masalahnya secara cepat, mudah, dan mendekat,” lanjut politisi Partai NasDem itu.

Lanjut Gobel, berdasarkan data Bank Indonesia, *outstanding* untuk usaha mikro pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 turun 22,94 persen, dari Rp286,755 triliun menjadi Rp220,973 triliun. “Hal ini tentu memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita. Padahal pada periode yang sama untuk skala usaha kecil dan menengah naik, masing-masing 15,9 persen dan 9,03 persen,” katanya.

Legislator dapil Gorontalo itu menilai secara keseluruhan pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil, mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan. Bahkan jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut dia, rasio kredit yang diterima UMKM baru 7 persen. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand.

“Padahal 99,9 persen usaha di Indonesia adalah sektor UMKM, dengan mayoritas sektor UMKM itu adalah usaha mikro, yaitu 98,68



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Dok/Invi

persen. UMKM juga menyerap 89 persen tenaga kerja serta kontribusinya terhadap PDB mencapai 57,8 persen. Jadi peran mereka sangat besar bagi perekonomian nasional,” kata Gobel.

Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah memperkuat PNM dan koperasi. Terlebih, urainya, Presiden Jokowi telah memuji peran PNM di berbagai forum nasional dan internasional. Terakhir disampaikan dalam forum G20 di Roma pada 30 Oktober 2021 lalu. PNM tak hanya menyalurkan kredit tapi juga melakukan pendampingan. Termasuk perlu adanya penguatan pembiayaan untuk koperasi.

“Jadi jika ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maka berikan pada PNM ini, bukan untuk kereta cepat. Mereka terbukti efektif. Untuk Program Mekaar saja, yang disebut Pak Presiden di (KTT G20) Roma, PNM memiliki 44 ribu tenaga pendamping. (Selain itu) *bikin* koperasi hingga ke tingkat desa. Juga sudah banyak koperasi yang sudah terbukti sehat dan efektif. Salurkan lewat mereka juga,” saran Gobel. ■ hal/sf

Hadiri COP26 , Gus Muhaimin Tawarkan Dua Solusi Atasi Ancaman Perubahan Iklim

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, perubahan iklim merupakan ancaman global yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia tanpa terkecuali, seperti pandemi Covid-19. Terlebih muncul bukti sains dan kualitatif yang tidak bisa dibantah bahwa bumi semakin panas, cuaca ekstrem, permukaan air laut naik dan banjir dalam skala yang ekstrem.

“Semuanya akibat dari perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ancaman katastrofik (mematikan) bagi keberlanjutan dan kemakmuran semua negara dan semua penduduk dunia,” tutur Gus Muhaimin saat menghadiri *Talkshow* bersama Pelaku Usaha di Paviliun Indonesia COP26 UNFCCC Glasgow, Senin (8/11).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menambahkan, Indonesia memiliki kedudukan khusus dan dapat memainkan peran penting dalam mendinginkan suhu bumi. Dia menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia, karena hutan alam dan mangrove akan dan telah menyerap karbon dalam skala raksasa.

Meski demikian, Gus Muhaimin mengakui, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kerentanan ekstrem akibat perubahan iklim, naiknya permukaan laut, curah hujan ekstrem dan kegagalan panen.

Karena itu, Gus Muhaimin menyatakan perlu solusi-solusi perubahan iklim yang urgen dan mendesak untuk kepentingan Indonesia dan kebutuhan dunia.



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Ist/nvl

”

INDONESIA MEMILIKI KEDUDUKAN KHUSUS DAN DAPAT MEMAINKAN PERAN PENTING DALAM MENDINGINKAN SUHU BUMI, INDONESIA SEBAGAI PARU-PARU DUNIA,

“Kita perlu menggunakan pendekatan *a whole government* dan *a whole society* untuk mencapai target *peak emission national* dan *carbon net sink* FOLU (Forestry and Other Land Use) pada tahun 2030 dan *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Di sisi lain, Gus Muhaimin mengutarakan dua solusi mengatasi perubahan iklim. Pertama, perubahan kebijakan, dan kedua adalah perubahan perilaku. Dua solusi ini disebutnya harus dilaksanakan berbarengan. Perubahan di sisi negara menurut Gus Muhaimin tidak cukup tanpa diimbangi perubahan perilaku masyarakat.

“Jadi perubahannya itu dari sisi *supply* dan sisi *demand* sekaligus. Dengan cara ini, pada tahun 2030, kita akan menambah sumber energi kita yang bersumber dari matahari, angin dan sumber-sumber energi *renewable* lainnya. Pada tahun 2030, kita akan berhasil menghentikan dan mengurangi deforestasi. Dan dengan cara itu pula, pada tahun 2060 atau lebih cepat, kita sudah dapat meraih target *net zero* kita,” tutup legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut. ■ **tn/es**

Komisi II Tegaskan Perlunya Penguatan KASN

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan diperlukan penguatan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terutama dalam fungsi *check and balance* agar *like and dislike* atau intervensi politik praktis dalam birokrasi dapat dicegah. Maka, dalam UU ASN nantinya harus mampu memberi kewenangan yang lebih luas bagi lembaga pengawasan sistem merit yang independen.

Demikian diungkapkan Doli saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang ASN

”

PENGUATAN KASN DIPERLUKAN KARENA DALAM PRAKTIKNYA MASIH BANYAK REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN BELUM SEPENUHNYA DIJALANKAN

Komisi II DPR RI dengan Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Senin (8/11). Pertemuan ini

dalam rangka mendapatkan masukan terkait Pembahasan Revisi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Penguatan KASN diperlukan karena dalam praktiknya masih banyak rekomendasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya dijalankan. Kalau saya dari awal, pilihannya KASN ini ada dua yakni KASN tetap ada tapi tidak seperti sekarang serta KASN ke depan harus diperkuat. Tujuannya, terutama dalam *check dan balance* supaya *like and dislike* atau intervensi politik praktis dalam birokrasi dapat dicegah,” ujar politisi Partai Golkar tersebut lebih lanjut.

Sementara itu, salah satu pakar akademisi UII berpandangan sistem merit adalah hal niscaya dalam menjawab tantangan menuju birokrasi kelas dunia 2024 mendatang. Sistem merit yang selama ini digaungkan KASN, secara nyata melindungi kepastian karier ASN dari berbagai ancaman, seperti intervensi politik praktis yang masih marak. ■ pun/es



Foto bersama Tim Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dengan Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Foto: Puntho/nvl

Keberadaan KASN jadi Sorotan, Komisi II Serap Pandangan Akademisi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengakui isu seputar keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) cukup menjadi sorotan banyak pihak. Sehingga dalam merumuskan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Komisi II DPR RI masih perlu menggali berbagai pendapat dan saran dari berbagai pihak salah satunya masyarakat akademik.

“Isu KASN ini juga jadi sorotan. Ada yang memandang ini cukup menjadi persoalan dengan berbagai argumentasinya. Maka oleh karena itu kami ingin mendapatkan pandangan yang objektif dari kampus-kampus,” ujar Saan saat pertemuan Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di Fisip Undip, Semarang, Jateng, Senin (8/11).

Sebelumnya memang terdapat usulan agar tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan sistem merit di KASN dapat dialihkan ke

”

**SEBAB BAGAIMANA
PUN JUGA KASN INI
KAN BUAH REFORMASI.
UNTUK MENUJU
KESANA MEMANG
PENTING BINCANG-
BINCANG DENGAN
DUNIA KAMPUS. SEBAB
MEREKA NETRAL**



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa bertukar cenderamata dengan akademisi Undip. Foto: Agung/nvl

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Sementara dalam Panja RUU ASN ditemui beragam pendapat terkait isu tersebut.

“Memang ada yang ingin dihapus, namun ada pula yang ingin KASN tetap ada atau bahkan ada yang mengusulkan untuk diperkuat,” sebut Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin ditemui di sela-sela pertemuan berlangsung. Oleh karena ragam pandangan itulah, menurutnya, Panja perlu mendengar pandangan dari para akademisi secara langsung.

“Supaya bisa menambah khazanah kami dan membuat kami semakin. Sebab bagaimana pun juga KASN ini kan buah reformasi. Untuk menuju kesana memang penting bincang-bincang dengan dunia kampus. Sebab mereka netral,” terang Zulfikar.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong adanya evaluasi terhadap KASN. “Sampai sejauh mana (KASN) ini bisa mengatasi persoalan yang mengemuka. Sebab mereka menangani seluruh Indonesia, namun sumber daya terbatas, maka ini yang jadi evaluasi,” tukasnya. ■ ah/sf

Komisi V Apresiasi Pembangunan Rusun ASN oleh Kementerian PUPR



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat meninjau pembangunan rumah susun untuk ASN. Foto: Hira/nvl

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pembangunan rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembangunan Rusun ASN ini dinilai merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk mendukung terwujudnya penyediaan hunian layak di lingkungan ASN.

“(Rusun ini) semoga menjadi alternatif hunian bagi para ASN, yang juga telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Sehingga harapannya para ASN yang tinggal di

”

DIHARAPKAN PARA PIHAK YANG AKAN MENGELOLA RUSUN INI BERKOMITMEN UNTUK MENGELOLA BANGUNAN INI SEBAIK-BAIKNYA

rusun ini nantinya bisa fokus bekerja sebagai aparatur negara,” terang Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR

RI ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/11).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan rumah susun adalah untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

“Diharapkan para pihak yang akan mengelola rusun ini berkomitmen untuk mengelola bangunan ini sebaik-baiknya, sehingga menjadikan rusun ini sebagai tempat tinggal yang nantinya *men-support* para ASN sebagai aparatur negara,” harap Andi Iwan.

Saat peninjauan, Komisi V DPR RI menyampaikan beberapa aspek perlu menjadi perhatian. Aspek tersebut seperti percepatan pembangunan perlu didorong, ketersediaan fasilitas pendukung Rusun ASN seperti akses jalan, air bersih, listrik dan sarana dan prasarana umum lainnya, Keandalan dan kekuatan struktur bangunan rusun

terhadap bencana gempa bumi juga koordinasi yang intensif dalam pengelolaan rusun ke depannya, sehingga ASN yang tinggal di rusun tersebut adalah yang benar layak.

Plt Direktur Rumah Susun Kementerian PUPR Maryoko Hadi menyambut baik kunjungan Komisi V DPR RI. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan Komisi V DPR RI menjadi semangat untuk memperbaiki kekurangan. “Pastinya kami akan melaksanakan (masukan) itu semua sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan dan juga itu sudah sejalan dengan apa yang kami rencanakan,” ujar Maryoko Hadi. ■ hal/sf

Komisi V Imbau Pemerintah Optimal Sosialisasikan Bahan Bangunan Beracun

Anggota Komisi V DPR RI Anang Susanto menilai Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum optimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahan-bahan bangunan beracun yang bisa membahayakan bagi masyarakat.

“Yang kami temukan, Bina Teknik ini masih ada ketergantungan terhadap instansi lain untuk membuat suatu keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Contoh kasus ada bahan-bahan beracun yang tidak boleh digunakan tapi pihak Bina Teknik ini belum bisa melakukan sosialisasi optimal kepada masyarakat,” katanya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/11).

Politisi Partai Golkar itu menginginkan hal tersebut dapat diketahui secara luas meskipun harus melalui instansi yang lain. Diharapkan ke depan, harus bisa dibuat suatu terobosan supaya hal itu bisa dilakukan juga oleh Direktorat Bina Teknik Permukiman-Perumahan sendiri.

“Yang kita imbau supaya bahan beracun itu tingkat ketahuannya di masyarakat harus semakin meluas sehingga nanti ada kesadaran di masyarakat untuk tidak digunakan lagi hal-hal semacam itu seperti penggunaan asbes, bata ringan dengan semen biasa, dan lain lain,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II Itu.

Pada kesempatan itu, Komisi V DPR RI meninjau kondisi balai dan kegiatan di dalamnya, yakni kegiatan layanan pengujian bahan bangunan, inspeksi, sertifikasi dan pengkajian teknologi yang sedang dilaksanakan.

“Kami meminta agar pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi bahan dan produk konstruksi serta penilaian keandalan bangunan juga dilaksanakan dengan baik sesuai

standar yang telah ditentukan,” jelas Anang lebih lanjut.

Komisi V DPR RI berharap agar ke depan semakin banyak terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur utamanya untuk mendukung mutu material konstruksi baik untuk ketahanan gempa maupun letusan gunung berapi. ■ cas/sf



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau fasilitas Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Foto: Chasbi/nvl

Komisi V Tinjau Progres Pembangunan Bendungan Sadawarna di Subang

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Anggota Komisi V Bambang Hermanto meninjau progres pembangunan Bendungan Sadawarna, di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Diketahui Bendungan Sadawarna ini dibangun karena adanya permintaan kebutuhan air bersih, guna mensuplai ke kawasan industri Patimban.

Hermanto mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bastari di Bendungan Sadawarna, Subang, Kamis (4/10).

“Seperti kami lihat hari ini, alhamdulillah bendungan ini masih berlanjut pembangunannya walau dalam keadaan dan situasi pandemi bisa berjalan lancar. Dan disampaikan

saat ini sudah rampung hingga 70 persen progresnya. Artinya bendungan tidak lama lagi akan segera rampung, dimana targetnya Juli 2022,” jelas Hermanto.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menyampaikan, usai rampungnya

”

KEBERADAAN BENDUNGAN INI HARUS MEMBAWA MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA UNTUK MASYARAKAT SEKITAR,

pembangunan Bendungan Sadawarna akan ditindaklanjuti pembangunan instalasi air bersih untuk memasok air

bersih ke kawasan industri Patimban. Diharapkan setelah rampungnya pembangunan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, seperti mensuplai pasokan air bersih, serta irigasi pertanian di Indramayu dan Subang.

“Saya menginginkan rampungnya pembangunan Bendungan Sadawarna, daerah-daerah yang teraliri air bisa meningkatkan produksi, terutama di bidang pertanian. Seperti di ketahui daerah Indramayu sebagai lumbung padi nasional dan di Subang ini merupakan kawasan daerah persawahan,” urai legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu.

Hermanto juga mengingatkan bahwa keberadaan bendungan ini harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat sekitar, tidak hanya petani tetapi masyarakat yang terdampak keberadaan bendungan.

Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Airlangga Mardjono menjelaskan, pembangunan Bendungan Sadawarna adalah satu dari 61 program pembangunan bendungan yang dicanangkan sejak tahun 2014. Dimana, diharapkan semua pembangunan bisa tuntas pada tahun 2024 mendatang.

Namun karena situasi pandemi serta adanya *refocusing* anggaran, ada empat bendungan yang akan mundur dalam pembangunannya dan ditargetkan akan tuntas pada tahun 2025. “Untuk Bendungan Sadawarna masih *on schedule*, walaupun pada awal kami melakukan kegiatan pembangunan ada kendala sedikit dalam proses pengadaan tanahnya,” jelasnya. ■ rni/sf



Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan Bendungan Sadawarna di Subang, Jawa Barat. Foto: Runit/nvl



Fungsi dan Layanan Asrama Haji Balikpapan harus Ditingkatkan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Kaltim. Foto: Dep/ivl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, harus ada peningkatan fungsi dan peningkatan pelayanan Asrama Haji Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur seiring dengan adanya pengembangan Provinsi Kaltim yang akan menjadi ibu kota negara.

“Dengan adanya pengembangan ibu kota (baru), maka juga harus ada peningkatan fungsi pelayanan asrama haji. Yang kami temukan dalam pembahasan, salah satu persoalannya adalah mengenai regulasi yang belum bisa diperluas,” tutur Diah saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (9/11).

Diah menyatakan, masalah asrama haji di Kaltim ini menjadi strategis,

karena lokasinya yang sangat baik yakni berada di depan pintu tol. Selain itu, asrama haji tersebut juga akan menjadi asrama haji di ibu kota negara.

“Yang tadinya sifatnya daerah nantinya menjadi pusat. Integrasi fungsi-fungsi dari yang tadinya level

”

DENGAN ADANYA PENGEMBANGAN IBU KOTA (BARU), MAKA HARUS JUGA ADA PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN ASRAMA HAJI.

daerah menjadi melayani tingkat level ibu kota negara inilah yang menjadi perhatian kita. Bila didalami pembahasannya, kita bisa melihat potensi perkembangannya seiring dengan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara ke depan,” ujarnya.

Diah mengungkapkan, selain masalah fungsi asrama haji yang ada di Kaltim, persoalan sosial lain yang juga mengemuka dalam pertemuan antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Kaltim salah satunya adalah tentang orang-orang terlanter korban *trafficking* ketenagakerjaan, baik dari daerah perbatasan ataupun mereka yang pernah dijanjikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang tambang maupun kelapa sawit.

“Tentu persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan kehadiran ibu kota negara juga ka harapkan ada perbaikan,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu. Menyangkut masalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kaltim, Diah mengatakan, problem tersebut merupakan problem kultural dan persoalan masih lemah penanganan hukumnya, baik secara normatif ataupun praktis.

“Dalam penanganannya banyak memiliki kelemahan untuk mengeksekusi kasus. Inilah persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Oleh karenanya, DPR mencoba membangun solusinya melalui pendekatan undang-undang, yaitu UU Penghapusan Kekerasan Seksual (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual),” jelasnya.

Dikatakannya, dengan pemahaman masyarakat yang semakin baik, telah menuntut regulasi yang ada agar semakin lengkap.

“UU-nya juga semakin tajam agar mampu memberi rasa keadilan bagi korban. Pendidikan masyarakat saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kemudian persoalan-persoalan ini muncul ke permukaan. Makin tinggi laporan tindak kekerasan seksual ini seiring makin tingginya empati dan kesadaran masyarakat,” pungkas Diah. ■ dep/es

Kunjungi Sumut, Komisi VIII Fokus Bahas Penanganan Bencana

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Aceh Hasan Sadzily mengatakan Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memfokuskan pada antisipasi penanggulangan bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam. Akhir-akhir ini Indonesia diterpa bencana akibat perubahan iklim yang mengakibatkan banjir, kerusakan lingkungan, hingga pandemi Covid-19. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), selama 10 tahun terakhir bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana banjir,

puting beliung, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Sementara berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2020, Sumut memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 145.18 (tinggi), dimana indeks risiko bencana di Sumut berada pada urutan ke-16 se-Indonesia. Dalam kaitan itulah, Komisi VIII DPR RI ingin memperoleh berbagai informasi dan masukan terkait kondisi saat ini dan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Sumut dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, baik bencana alam dan bencana non-alam yaitu ancaman Covid-19 gelombang ketiga serta perubahan iklim.

“Hal yang menjadi perhatian utama kami dalam Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara pada hari ini, kami melihat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana, tata kelola penyelenggaraan dan penanggulangan bencana yang terus harus terus ditingkatkan dan disinergikan, masalah koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga, antara pusat dan daerah masih belum optimal, juga pembangunan yang mengabaikan aspek resiko bencana, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, yang menyebabkan kebutuhan lahan dan eksploitasi lahan semakin tinggi,” ungkap Ace dalam pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (10/11).

Politisi Partai Golkar ini berharap dengan kehadiran Komisi VIII DPR RI ke Sumut ini dapat memperoleh berbagai informasi dan masukan berharga guna perbaikan kebijakan ke depan terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan masker dari BNPB. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada jajaran Pemprov Sumut untuk disalurkan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas. ■ man/sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Aceh Hasan Sadzily bersama Anggota Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan dari Kemensos dan BNPB di Sumatera Utara. Foto: Andri/nvl

Perlu Keberpihakan untuk Dukung Kemandirian Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, untuk memberikan dukungan bagi kemandirian penyandang disabilitas, tidak bisa mengharapakan seluruhnya peran dari pemerintah. Karena faktanya banyak masyarakat Indonesia, khususnya kaum disabilitas yang membutuhkan bantuan. Karena itu semua pihak harus didorong untuk ikut serta mendukung kaum disabilitas mencapai kemandirian, khususnya di tengah keterbatasan anggaran.

“Maka kesepakatan Komisi VIII dengan pemerintah, (perlu ada) semacam stimulan, memberikan rancangan bagi masyarakat penerima langsung atau pemerintah di daerah untuk mencari format supaya mereka (penyandang disabilitas) lebih mandiri,” kata Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau sarana dan prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Selasa (9/11).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, saat ini bentuk dukungan kepada penyandang disabilitas masih sebatas pemberian bantuan, belum sampai secara masif mereka untuk mencapai kemandirian. Menurut Marwan, bentuk atensi dari pemerintah atau pihak terkait lainnya harus digeser ke arah kemandirian para penyandang disabilitas. Dari hasil peninjauan BRSPDSN Mahatmiya ini, Marwan menilai perlu adanya pemetaan dalam memberikan pelatihan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau sarana prasarana dan kegiatan di BRSPDSN Mahatmiya, Kabupaten Tabanan, Bali. Foto: Sofyan/nvi



SAAT INI BENTUK DUKUNGAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS MASIH SEBATES PEMBERIAN BANTUAN, BELUM SAMPAI SECARA MASIF MEREKA UNTUK MENCAPAI KEMANDIRIAN

kepada penyandang disabilitas sesuai dengan karakter daerahnya.

“Kalau masyarakat Bali itu karena daerah wisatawan, maka (adanya) kafe (di BRSPDSN Mahatmiya) bisa berjalan. Mendorong (pelatihan) masyarakat disabilitas ke situ, saya pikir itu jauh

lebih mudah. Nah tapi kan semua karakter daerah tidak seperti Bali. Karena karakter daerahnya itu tidak sama, maka atensinya itu bantuan, belum kemandirian. Kita berharap ke depan pemetaan (pelatihan kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan karakter daerah) itu penting,” tandas Marwan.

Dalam kesempatan kunjungan yang turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam melindungi dan mendukung penyandang disabilitas. Selain meninjau berbagai fasilitas BRSPDSN Mahatmiya, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan sebesar Rp4,9 miliar dari Kementerian Sosial RI kepada para perwakilan penyandang disabilitas di Tabanan, Bali. ■ sf

Komisi IX Dukung Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Riau



Wakil Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena (tengah) memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Riau. Foto: Prima/nvl

Komisi IX DPR RI memantau kesiapan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Menurut Wakil Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, diperlukan sosialisasi secara masif agar pemahaman program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan semakin luas diterima oleh masyarakat.

“Bisa terlihat animo dari seluruh pihak di Riau mengharapkan program ini segera diimplementasikan dan bisa segera berjalan di lapangan. Walaupun tentu juga ada catatan program ini harus dijelaskan lebih masif ke

lapangan, sehingga melibatkan banyak pihak yang harus terkait dengan program ini,” jelasnya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Selasa (9/11).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Melki itu menambahkan, pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum menunjukkan tanda akan berakhir, bisa menjadi momentum yang tepat bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mengimplementasikan program tersebut. “Komisi IX memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan di pusat maupun di daerah agar program ini segera diimplementasikan sehingga dapat membantu para pekerja melewati

pandemi Covid dengan program dari BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Sebagai langkah antisipasi muncul permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, Melki berharap pihak BPJS Ketenagakerjaan dapat menggandeng beberapa *stakeholder*, salah satunya Kejaksaan Tinggi (Kejati). “Kejati Riau juga mendukung berbagai hal permasalahan hukum dapat dikoordinasikan dengan baik. Dan tentu dengan kerja Gubernur Riau beserta jajarannya serta dukungan dari berbagai pihak mudah mudahan BPJS Ketenagakerjaan baik di pusat maupun di Provinsi Riau bisa *me-follow up* hasil pertemuan ini yang sangat baik,” tutup legislator dapil NTT II itu. ■ pdt/es

Perlu Sinergi untuk Optimalisasi Perluasan Kepesertaan BP Jamsostek

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, perlu adanya sinergi para pemangku kebijakan pada tingkat pusat maupun daerah dalam optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021. Beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti pembinaan maupun penegakan ketentuan yang lebih intensif serta terobosan-terobosan yang menyesuaikan dengan kondisi daerah.

“Pemprov Jatim sudah cukup baik dengan mengeluarkan Pergub Nomor 36 Tahun 2021 untuk memastikan perluasan kepesertaan BP Jamsostek. Cuma memang masih perlu sosialisasi sampai ke tingkat kabupaten/kota agar sepenuhnya dapat terinternalisasi dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan turut berperan aktif sesuai sasaran binaannya,” ujar Ninik saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/11).

Di samping itu, politisi PKB tersebut juga menyoroti belum sinerginya masalah pendanaan antara pemerintah provinsi dan pemkab/pemkot dalam mengakomodir kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU). Ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini banyak pendapatan daerah makin berkurang, sehingga pemda banyak yang tidak

sanggup untuk menganggarkan khusus untuk kepesertaan BPU.

“Kami berharap memang harus duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Supaya tidak ada lagi persoalan gangguan finansial di antara pemprov maupun pemkab/pemkot. Yang pada akhirnya jadi saling melempar tanggung jawab. Padahal yang perlu ditangkap dari inpres ini adalah bagaimana pekerja ini bisa memiliki kepastian soal jaminan

ketenagakerjaan itu,” tuturnya.

Menurut politisi dapil Jawa Timur III ini, pemerintah daerah setidaknya bisa mengakomodir para pekerja BPU dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan hanya dua premi, yaitu manfaat jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Memang per orang cuma dikenakan iuran Rp16.800, itu mungkin bisa dilakukan, tetapi jika dalam jumlah yang besar akan membebani keuangan daerah juga. Untuk itu, kita harus bekerjasama menyelesaikan seperti apa untuk mengatasi hal ini,” urai Ninik.

Tak lupa, Ninik juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang tetap memberikan perlindungan bagi pegawai non-ASN yang diikutkan dalam kepesertaan seluruh Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meskipun Jatim sendiri memiliki keterbatasan APBD.

Diketahui, pada APBD tahun 2022, untuk kepesertaan BP Jamsostek, Pemprov Jatim telah menganggarkannya sejumlah 10.000 PTT-PK (Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja) dan 19.006 GTT/PTT di bawah binaan Pemprov Jatim. ■ jk/es



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Kunspek Komisi IX DPR RI ke Surabaya. Foto: Jaka/rvl



Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Sulawesi Utara. Foto: Husen/mvl

Gubernur Sulut Tak Hadir, Komisi IX Tutup Rapat

Kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lebih cepat berakhir. Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diundang tak hadir, rapat Komisi IX DPR RI pun langsung ditutup oleh Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara yang memimpin delegasi ke Sulut.

“Bukan ingin dihormati, tapi sesama pejabat negara harus saling tahu ketentuan yang mendasari rapat ini. Jadi dalam setiap kunjungan resmi DPR RI, bukan sekadar kunjungan dan jalan-jalan. Tapi ini rapat resmi berdasarkan perundang-undangan,” tandas Dewi, di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Selasa (9/11). Rapat di daerah, kata Dewi, nilainya sama dengan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut politisi Partai Golkar itu, delegasi Anggota DPR sedang menjalankan fungsi pengawasan saat

berada di daerah dalam rangkaian kunjungan kerja. DPR ingin melihat dari dekat pelaksanaan undang-undang, keberhasilan pembangunan, atau kekurangan yang terjadi di daerah. “Nilai rapat ini sama dengan rapat di DPR, hanya kami pindahkan. Kami

”

**SESAMA PEJABAT
NEGARA HARUS SALING
TAHU KETENTUAN YANG
MENDASARI RAPAT INI.
JADI DALAM SETIAP
KUNJUNGAN RESMI DPR
RI, BUKAN SEKADAR
KUNJUNGAN DAN JALAN-
JALAN. TAPI INI RAPAT
RESMI**

di sini sedang menjalankan fungsi pengawasan,” ungkap Dewi lebih lanjut.

Legislator dapil Jawa Barat IV ini, memimpin rapat dengan Pemerintah Provinsi Sulut untuk membahas ketenagakerjaan. Pemprov Sulut diwakili Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Denny Mangala. Gubernur Olly Dondokambey tak bisa hadir, karena saat bersamaan menjadi pembicara utama dalam acara Giat Katekisasi Pelayan Khusus Gereja GMIM. Begitu pula Wakil Gubernur sedang berkegiatan di tempat lain.

“Tugas DPR mencari fakta lapangan. Nanti kami bertanya kepada asosiasi pekerja, PNS, apa betul semua sudah terlindungi. Apa rencana program perlindungan pekerja, apa yang bisa kami bantu. Sebetulnya kunjungan kami untuk mengawasi dan membantu daerah,” tutur Dewi kepada para wartawan usai pertemuan. ■ mh/sf

Komisi XI: RUU HKPD Perkuat Pendapatan Daerah



Foto bersama usai pertemuan Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja di Bogor, Jawa Barat. Foto: Anne/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) yang dibahas Komisi XI DPR RI bersama pemerintah bertujuan untuk memperkuat fiskal daerah guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

“RUU HKPD ini di desain agar ada satu skema fiskal yang adil antara daerah yang kaya dan juga daerah-daerah yang miskin. Sehingga rumusan kita adalah rumusan yang lebih berkeadilan dan kita harapkan tidak ada disparitas antara kabupaten-kabupaten kaya dan miskin,” jelas Fathan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/11).

Ia menyebutkan, sebagai instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan

dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional melalui implementasi Undang-Undang (UU) 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Namun, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dalam rentang pelaksanaan kedua UU tersebut selama lebih dari satu dasawarsa, telah terjadi dinamika perkembangan keadaan yang cukup signifikan dan sekaligus munculnya berbagai tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, masih kata Fathan, perlu disusun kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi

pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi mendukung target pembangunan nasional, ataupun peningkatan kapasitas perpajakan daerah melalui penyusunan RUU HKPD yang merupakan bentuk pengintegrasian dan penyempurnaan atas UU 33 Tahun 2004 dan UU 28 Tahun 2009.

Menurut legislator dapil Jawa Tengah II tersebut, nantinya RUU HKPD ini mengatur secara komprehensif terkait peningkatan *local taxing power*, reformulasi transfer ke daerah yang lebih berkeadilan, sekaligus akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah. Hal ini diperlukan guna menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional di tengah perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian. ■ ann/sf

RUU HKPD Harus Berdampak pada Pemerataan Pertumbuhan Pusat dan Daerah

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) yang sedang dibahas Komisi XI DPR RI, harus diatur agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nasional bisa dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah. Peralnya, pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat yang relatif sering dibanggakan, pada kenyataannya tidak berkorelasi pemerataan pertumbuhan di berbagai daerah.

“Oleh karena itu, menurut saya dalam RUU HKPD ini harus diatur bagaimana pertumbuhan yang tinggi secara nasional, bisa juga dirasakan kemanfaatannya yang relatif sama. Baik pertumbuhan itu antara provinsi dengan provinsi lainnya, maupun kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Jadi pertumbuhan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten memiliki derajat pertumbuhan ekonomi yang relatif tidak terlalu jauh, di sejumlah daerah itu ada yang mencapai angka 7 persen, 2 persen, bahkan ada yang cuma 1 persen,” ujar Agun saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jumat (5/11).

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, misalnya pertumbuhan ekonomi di Banten, jika melihat pertumbuhan di Tangerang Raya dan Serang itu relatif baik, tetapi kalau dibandingkan dengan Kabupaten Pandeglang dan Lebak, cukup tertinggal. Untuk itu, dalam RUU HKPD

ini harus diatur hubungan keuangan baik itu antar provinsi, provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota. Sehingga pemerintah daerah ini memiliki sinergi keuangan, hal ini tentu saja perlu didalami seperti yang diusulkan oleh Bupati Tangerang.

“Bupati Tangerang mengusulkan agar Kabupaten Tangerang bisa mendapatkan manfaat lebih. Menurutnya, ada 4200 industri di Kabupaten Tangerang, tetapi semua pajaknya ditarik ke pusat. Sedangkan dana bagi hasil yang diperoleh daerah rasanya perlu dikaji kembali dan kita hitung ulang, supaya dana bagi hasil itu juga bisa dirasakan manfaatnya oleh daerah. Kalau diibaratkan daerah itu saat ini hanya menjadi penonton, seperti melihat ikan bagus di akuarium, tapi cuma bisa ditonton saja. Lewat RUU HKPD ini diharapkan tidak sekadar menjadi penonton,” optimis legislator dapil Jawa Barat X ini.

Agun menuturkan, semangat inilah

yang dibangun Komisi XI DPR RI, dimana desentralisasi fiskal harus berkorelasi dengan desentralisasi otonomi daerah, sehingga diharapkan keuangan daerah menjadi piramida yang besar, bukan piramida terbalik. Kunjungan dalam rangka menyerap aspirasi RUU HKPD ini turut dihadiri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti; Ketua DPRD Banten Andra Soni; Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar; dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bambang Noertjahjo. ■ jk/sf

Anggota Komisi XI DPR RI
Agun Gunandjar Sudarsa.
Foto: Jaka/nvl





Foto bersama tim kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI bersama akademisi Universitas Padjajaran. Foto: Ayu/nvl

Pemda Jabar Minta Jumlah Transfer Daerah Didasarkan pada Jumlah Penduduk

Komisi XI DPR RI menyerap aspirasi dan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKAPD) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota se-Jabar, serta akademisi dari Universitas Padjajaran (Unpad).

“Alhamdulillah, hari ini kami bisa mengadakan pertemuan dengan Pemprov Jabar, pemda Kabupaten/kota di Jabar, serta akademisi dari UNPAD. Tentu banyak masukan yang terungkap dalam pertemuan ini yang akan memperkaya kami dalam penyusunan dan pembahasan RUU HKAPD nantinya,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Harmusa Oktaviani di sela-

sela pertemuan tersebut, Jumat (5/11).

Masukan tersebut di antaranya permintaan Pemprov Jawa Barat yang disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, terkait penentuan transfer daerah untuk tidak berdasarkan jumlah kabupaten/kota, namun lebih kepada jumlah penduduk.

Pasalnya selama ini Jabar termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, namun jumlah kabupaten/kota lebih sedikit dibanding provinsi lain. Akibatnya, Jabar selama ini mendapat transfer daerah yang lebih kecil dibanding provinsi lain.

Selain itu, terungkap juga usulan terkait pemberian wewenang kepada pemprov untuk ikut dilibatkan dalam transfer dana desa. Pasalnya jika

terjadi permasalahan di kabupaten/kota, maka pemprov yang pasti akan turun tangan menyelesaikannya. ■ ayu/es

”

PASALNYA SELAMA INI PROVINSI JABAR TERMASUK DAERAH YANG MEMILIKI JUMLAH PENDUDUK YANG CUKUP TINGGI, NAMUN JUMLAH KABUPATEN/KOTA LEBIH SEDIKIT DIBANDING PROVINSI LAIN

Indonesia Usulkan APPF Jajaki Pertemuan Khusus Bagi Anggota Parlemen Muda

Parlemen Indonesia mengusulkan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) untuk menjajaki pertemuan khusus bagi anggota parlemen muda. Demokrasi yang sehat dalam proses pengambilan keputusannya perlu lebih inklusif. Semakin besar peran dan kontribusi generasi muda semakin penting sehingga mampu menempa inovasi dan terobosan dalam mengatasi tantangan yang terus berkembang dan menemukan solusi yang tepat.

Demikian diutarakan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri bersama Anggota BKSAP DPR RI Diri Irawadi saat mengikuti Rapat Komite Eksekutif APPF ke-29 melalui *Virtual Meeting* dari Serpong, Banten, Rabu (10/11). Dalam rapat ini, Indonesia menyampaikan beberapa poin terkait amanat Resolusi APPF ke-28 terkait Peran Presiden kepada Presiden dan Komite Eksekutif APPF.

“Indonesia berkeyakinan bahwa sampai saat ini, tanpa sekretariat tetap, APPF dapat berjalan dengan baik, dan oleh karena itu akan melanjutkan pengaturan yang ada. Setiap parlemen tuan rumah tetap memfasilitasi dan mendukung pengaturan pertemuan tahunan APPF melalui Sekretariat ad-hoc. Oleh karena itu, parlemen tuan rumah akan terus mendanai dan mendukung organisasi APPF dan kegiatannya,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Indonesia, lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini berbagi gagasan bahwa APPF harus adaptif dan responsif



Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri bersama Anggota BKSAP DPR RI Diri Irawadi. Foto: Oji/nvl

terhadap kebutuhan dan tantangan saat ini dalam mempertahankan organisasi APPF dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya.

“Masalah Kepresidenan APPF tetap diperlukan sebagai perwakilan tertinggi APPF untuk mempromosikan dan mengadvokasi tujuan kolektif, kepentingan, dan visibilitas organisasi di panggung global. Kami menyarankan Kepresidenan hanya menjabat satu tahun, bukan tiga tahun,

sejalan dengan periode keketuaan sehingga program dan kegiatan Presiden dapat diselaraskan dengan program dan kegiatan negara tuan rumah,” tandasnya.

Legislator dapil Maluku Utara ini menegaskan pemilihan Presiden APPF harus dilakukan secara bergilir sub-daerah. Presiden terpilih juga akan memimpin Rapat Tahunan, serta rapat Panitia Pelaksana, Panitia Perancang, Anggota Parlemen Perempuan, dan rapat lainnya tentang hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan. ■ oji/sf

BAKN Gali Masukan dari Akademisi Undip terkait Permasalahan Agraria

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya memimpin kunjungan kerja BAKN ke Universitas Diponegoro guna penelaahan terkait permasalahan agraria, tata ruang, dan pertanahan nasional. BAKN menyoroti soal pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2019. Dalam laporan tersebut, BPK RI mengungkapkan terdapat 7 temuan, 13 permasalahan, dan 20 rekomendasi. Salah satunya terdapat permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp225,53 juta.

Wahyu menyampaikan, selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan Pemeriksaan Kinerja

pada Kementerian ATR/BPN. Hasil Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNPB Tahun Anggaran 2017 semester I pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan.

“Antara lain, permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan,” papar Wahyu di hadapan para pakar agraria Undip, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/11).

Wahyu menjelaskan, BAKN minta masukan dari para akademisi dengan alasan bebas dari kepentingan, bisa

melihat permasalahan secara jernih dengan sudut pandang aturan yang berlaku dan ilmu pengetahuan. BAKN juga menjadikan saran dan masukan dari pakar agraria sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

Adapun permasalahan lain yang terungkap yakni, hasil Pemeriksaan Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) tahun 2015 semester I. Dengan permasalahan antara lain, peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan dengan kondisi saat ini.

Terdapat beberapa sertifikat penerima Redistribusi TOL yang tidak mempunyai warkah tanah, pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani, dan kenaikan pendapatan per personal *income* masyarakat subjek reforma agraria sebagai indikator kinerja utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat. ■ eko/es



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin kunjungan kerja BAKN ke Universitas Diponegoro. Foto: Eko/nvl

”

BPK RI MENGUNGKAPKAN TERDAPAT 7 TEMUAN, 13 PERMASALAHAN, DAN 20 REKOMENDASI. SALAH SATUNYA TERDAPAT PERMASALAHAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA SEBESAR RP225,53 JUTA.

Realisasi Anggaran DPR Triwulan III Sudah Mencapai 65,87 Persen

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, realisasi anggaran DPR

RI hingga triwulan III 2021 sudah mencapai 65,87 persen. Capaian ini sudah jauh lebih baik, karena melampaui standar

minimum penilaian indikator kinerja anggaran sebesar 60 persen.

Indra mengungkapkan hal ini dalam acara rapat kerja bersama Biro Organisasi dan Perencanaan, Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertajuk 'Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Tahun Anggaran 2021 dan Persiapan Anggaran Tahun 2022' yang diselenggarakan di

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Dok/nvl

Jakarta, Jumat (5/11).

"Secara agregat, realisasi anggaran DPR hingga triwulan III 2021 telah mencapai Rp3.815.453.000.000 atau 65,87 persen lebih tinggi dari standar minimum penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 60 persen," urai Indra. Angka tersebut, katanya, didapat dari satuan kerja (Satker) dewan sebesar Rp2.824.589.000.000 atau 66,83 persen. Dan Satker Setjen sebesar Rp990.863.000.000 atau 63,28 persen.

Namun, lanjut Indra, masih ada beberapa unit kerja yang realisasinya di bawah 60 persen hingga awal November 2021. Ia mengimbau agar unit kerja yang realisasinya di bawah 60 persen segera memberikan penjelasan sekaligus mempercepat realisasinya, karena waktu yang tersisa tinggal enam minggu lagi.

”

SECARA AGREGAT REALISASI ANGGARAN DPR HINGGA TRIWULAN III 2021 TELAH MENCAPAI RP3.815.453.000.000 ATAU 65,87 PERSEN LEBIH TINGGI DARI STANDAR MINIMUM PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

"Secara efektif jangka waktu untuk merealisasikan anggaran tersisa ada enam minggu lagi. Seluruh unit kerja harus bisa merealisasikan dan mempercepat pertanggungjawaban anggaran. Apabila kurang mampu merealisasikan anggaran dapat berkoordinasi dengan bagian perencanaan untuk menyusun *exit plan*, mengoptimalkan anggaran tersebut," pungkas Indra. ■ mh/es



RS Hermina Pasteur Bandung, Representatif bagi Peserta Jamkestama

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, pelaksanaan program pelayanan jaminan kesehatan utama (Jamkestama) yang dijalankan di Rumah Sakit Hermina Pasteur Bandung sudah maksimal. Sehingga dirinya merekomendasikan bagi Anggota Dewan juga keluarganya yang memerlukan layanan kesehatan untuk tak ragu mendatangi RS Hermina Pasteur Bandung.

“Kalau pelayanan (RS), dipaparkan sudah sangat baik. Banyak sekali kemudahan yang diberikan untuk peserta Jamkestama VVIP, termasuk salah satunya tidak perlu menunggu di IGD. Kalau tidak parah, bisa langsung masuk kamar perawatan,” terang Agung usai pertemuan dengan jajaran direksi RS Hermina Pasteur Bandung serta perwakilan PT Jasindo di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/11).

Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwasanya RS Hermina Pasteur sudah 15 tahun bekerjasama dengan PT Asuransi Jasindo. Sehingga, Agung meyakini, langgengnya kerja sama tersebut pasti diikuti dengan hubungan yang harmonis pula di antara keduanya, baik itu dari layanan terhadap peserta Jamkestama oleh RS provider, maupun klaim pembayaran yang menjadi tanggung jawab Jasindo.

“Saya kira (layanan) ini harus dipertahankan oleh RS Hermina yang menjadi rujukan bagi Anggota DPR beserta keluarganya, terutama daerah pemilihan Jabar 1 maupun bagi para Anggota DPR yang sedang berkunjung ke Bandung. Dengan pelayanan



BURT DPR RI bertukar cenderamata dengan jajaran direksi RS Hermina Pasteur Bandung. Foto: Erman/nvi

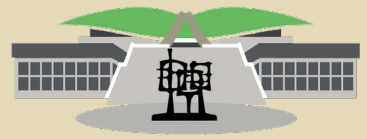
prima ini, kami menyarankan Anggota Dewan yang membutuhkan layanan kesehatan, bisa menghubungi RS Hermina Pasteur,” tegasnya.

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat ini mengapresiasi layanan *Home Care Service* yang merupakan inovasi RS Hermina ini. Melalui layanan ini, tim kesehatan dari RS Hermina mendatangi dan menangani pasien di rumahnya masing-masing.

“Situasi seperti ini, walaupun pandemi Covid-19 sudah turun, tetapi banyak pasien masih enggan datang ke RS. Saya kira pelayanan *Home Care* ini menjadi terobosan bagi RS Hermina kepada pasien. Kalau pasien itu tidak

mau ke RS, dengan *Home Care* itu bisa langsung ditangani,” ucap Agung.

Agung juga mengapresiasi adanya kendaraan jenis ambulans yang khusus menangani pasien penyakit jantung. “Kita tidak tahu serangan jantung itu kapan, apalagi tidak pernah melakukan *medical checkup*. Nah penyakit jantung ini kan ada yang namanya *golden time*, kalau jauh tempatnya dan tidak tertangani, itu kan fatal. Kalau bisa cepat dan ada mobil serta tim dari Hermina yang luar biasa dan cepat, insya Allah nyawanya tertolong. Ini juga merupakan unggulan dari RS Hermina ini,” pungkas Agung. ■ es



Komisi I DPR RI dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid mengunjungi kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam rangka verifikasi faktual di Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta, Minggu (7/11). Foto: Runi/nvl



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memimpin Komisi V DPR RI meninjau kelanjutan pembangunan LRT Jabodebek di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/11). Foto: Saum/nvl



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melantik Anggota DPR RI F-NasDem Rusdi Masse Mappasessu sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, menggantikan Hasan Aminudin, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Selasa (9/11). Foto: Arief/NVL

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melantik Anggota DPR RI F-NasDem Syarif Abdullah Alkadrie sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI menggantikan Rusdi Masse Mappasessu di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11). Foto: Yoga/nvl

